

SKRIPSI

KETERLIBATAN KEPALA DESA DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:



FAKULTAS HUKUM


ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg:05/PK-V/II/2026

	Alumni University Number	Nafila Arifa Har	Alumni University Number
	a. Place/Date of Birth : Jakarta/10 Agustus 2003	f. Graduation Date : April 22th, 2026	
b. Parents' Name : Harnedi and Yelfani	g. Pass Predicate : Cumlaude		
c. Faculty : Law	h. Length of Study : 3 Years 8 Months		
d. Concentration : Constitutional Law	i. GPA : 3.84		
e. Student ID : 2210112046	j. Address : Jakarta Barat		

VILLAGE HEAD'S INVOLVEMENT IN WINNING CANDIDATE PAIRS IN THE 2024 LOCAL ELECTIONS

(Nafila Arifa Har, 2210112046, Constitutional Law, Faculty of Law, Andalas University, 123 Pages 2026)


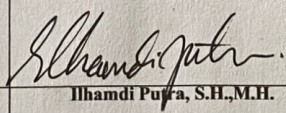
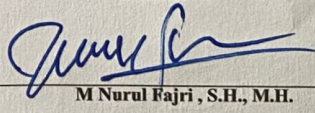
ABSTRACT

The implementation of the 2024 general election for regional heads (Pilkada) is based on the principles of direct, general, free, secret, honesty, and fairness in order to produce quality leaders according to the will of the people. The integrity of the democratic process depends on the neutrality of the village head who holds a central role at the lowest level of society. However, the facts on the ground show that there is an erosion of the integrity of the regional elections triggered by non-neutral actions from the village head in the form of taking actions or decisions that benefit one of the candidate pairs. On this basis, the formulation of the problem in this study is 1) How is the prohibition for village heads to be involved in winning candidate pairs in the election of regional heads in laws and regulations? 2) What is the mode of involvement of the village head in winning the candidate pair in the 2024 regional head election and the handling process at Bawaslu? 3) What are the legal considerations of the Constitutional Court in disputes over the results of regional head elections involving village heads? The research method used is normative juridical law research by obtaining data from literature studies. The results of the study explained that the regulation of the involvement of village heads in political contestation already exists in the Village Law, the Regional Election Law, and the Election Law. The modes of violation that occurred were in the form of the mobilization of the village head, covert campaigns, and the use of state facilities by the village minister to win the candidate pair, the active involvement of the village head in gathering support, the mobilization of the village head by the former acting regent of Nganjuk, and the mobilization of the village head by the Constitutional Court in considering a case will look at the completeness of the formal and material requirements, on the other hand the effectiveness of law enforcement carried out Bawaslu in various jurisdictions depends on the professionalism and quality of state administrators at the regional level. It can be concluded that regulations regulating the involvement of village heads already exist, but they are not complete enough to reach the various modus operandi of violations that occur and must emphasize the law enforcement process. The mode of involvement of village heads in various regions varies, ranging from village head mobilization, active involvement, and covert campaigns, the Constitutional Court (MK) in deciding cases considering the formal and material requirements of the applicant, in this study it was found that several violations of the neutrality of the village head were found that were not followed up by the Court due to the restriction of formal requirements. The author recommends that laws and regulations need to be detailed and clarified regarding the modus operandi of violations by village heads and synchronization between the Village Law and the Regional Election Law regarding the prohibition for candidate pairs. There needs to be an effective handling of violations by Bawaslu in terms of strategy, commitment and technicality, especially related to the involvement of village heads. There is a need to strengthen the Bawaslu institution in the enforcement of administrative law and relaxation of formal requirements by the Constitutional Court.

Keywords: Local Elections, Neutrality, Village Heads, Violations

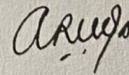
This minor thesis has defended in front of the examiner team at, April 22th 2026.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Nafila Arifa Har	Ilhamdi Putra, S.H., M.H.	M Nurul Fajri, S.H., M.H.

Acquainted,


Head of the Department of Constitutional Law: **Arfiani, S.H., M.H.**



Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

No. Alumni Faculty	Name:	Faculty/University Officer
No. Alumni	Name:	Sig

	No. Alumni Universitas	Nafila Arifa Har	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Jakarta/10 Agustus 2003 b. Nama Orangtua : Harnedi dan Yelfani c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Tata Negara e. No. BP : 2210112046	f. Tanggal Lulus : 22 April 2026 g. Predikat Lulus : Cumlaude h. Lama Studi : 3 Tahun 8 Bulan i. IPK : 3.84 j. Alamat : Jakarta Barat	

KETERLIBATAN KEPALA DESA DALAM PEMENANGAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024


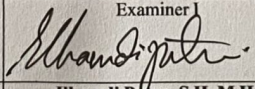
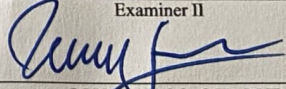
(Nafila Arifa Har, 221011026, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 123hal, 2026)

ABSTRAK

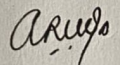
Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) tahun 2024 berlandaskan pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil guna melahirkan pemimpin berkualitas sesuai kehendak rakyat. Integritas proses demokrasi tersebut bergantung pada netralitas kepala desa yang memegang peran sentral ditingkat masyarakat paling bawah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya erosi integritas pilkada dipicu oleh tindakan tidak netral dari kepala desa berupa melakukan tindakan atau keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Atas dasar tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana pengaturan larangan bagi kepala desa untuk terlibat dalam pemenangan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah di dalam peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana modus keterlibatan kepala desa dalam pemenangan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 dan proses penanganan di Bawaslu? 3) Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang melibatkan kepala desa?. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan memperoleh data dari studi kepustakaan. Hasil penelitian memaparkan bahwa pengaturan keterlibatan kepala desa dalam kontestasi politik sudah ada di dalam UU Desa, UU Pilkada, maupun UU Pemilu. Modus pelanggaran yang terjadi berupa mobilisasi kepala desa, kampanye terselubung, dan penggunaan fasilitas negara oleh Menteri desa untuk memenangkan pasangan calon, keterlibatan aktif kepala desa dalam menggalang dukungan, mobilisasi kepala desa oleh mantan penjabat bupati Nganjuk, serta mobilisasi kepala desa oleh Pasangan. Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan suatu perkara akan melihat kelengkapan syarat formil maupun materiil, disisi lain efektivitas penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu di berbagai wilayah hukum bergantung pada sikap profesionalitas dan kualitas penyelenggara negara ditingkat daerah tersebut. Dapat disimpulkan regulasi yang mengatur keterlibatan kepala desa telah ada, namun belum cukup utuh menjangkau berbagai modus operandi pelanggaran yang terjadi dan harus menekankan pada proses penegakan hukumnya. Modus keterlibatan kepala desa di berbagai daerah bervariasi, mulai dari mobilisasi kepala desa, pelibatan aktif, serta kampanye terselubung, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara merimbang syarat formil maupun materiil pemohon, pada penelitian ini ditemukan beberapa pelanggaran netralitas kepala desa yang tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah karena pembatasan syarat formil. Penulis merekomendasikan terhadap peraturan perundang-undangan perlu diperinci dan diperjelas mengenai modus operandi pelanggaran oleh kepala desa dan sinkronisasi antara UU Desa dan UU Pilkada terkait larangan bagi pasangan calon. Perlu adanya efektivitas penanganan pelanggaran oleh Bawaslu pada strategi, komitmen dan teknis khususnya terkait keterlibatan kepala desa. Perlu adanya penguatan kelembagaan Bawaslu dalam penegakan hukum administratif dan Kelonggaran syarat formil oleh MK.

Kata Kunci: Pilkada, Netralitas, Kepala Desa, Pelanggaran

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 22 April 2026.
Penguji,

Signature 	Examiner I 	Examiner II 
Nafila Arifa Har	Ilhamdi Putra, S.H., M.H.	M Nurul Fajri, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Tata Negara: **Arfiani, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas
No. Alumni Fakultas	Nama: Fakultas/Universitas
No. Alumni	Nama: T